

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil uraian peneliti berupa wawancara yang peneliti lakukan dengan informan baik secara langsung maupun via telepon peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Pemberdayaan Sosial di Kabupaten Kepulauan Mentawai belum berjalan dengan baik kendati terus dilaksanakan pada tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya persoalan pada Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menghambat kinerja program. Peneliti melihat masih terdapat kekurangan-kekurangan seperti kurangnya sumberdaya manusia untuk melaksanakan pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil dengan tidak adanya peran dari POKJA Provinsi yang sudah lama tidak aktif lagi, sehingga tugas dan tanggungjawab dipegang oleh pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berdampak signifikan terhadap jalannya pemberdayaan ditingkat provinsi.

Selain itu minimnya ketersediaan sumberdaya finansial ditingkat kabupaten turut serta memperlambat kinerja dari program Pemberdayaan Sbagi Komunitas Adat Terpencil di tingkat kabupaten. Hal ini tergambar dalam wawancara pada BAB V, bahwasanya setelah kegiatan pemberdayaan dilaksanakan oleh provinsi maka kegiatan dilanjutkan oleh pihak Kabupaten

namun kurangnya dukungan anggaran membuat pergerakan dari kabupaten bersifat pasif.

Temuan peneliti lainnya bahwasanya dalam tahapan persiapan terdapat kendala dalam menentukan lokasi oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hal ini dikarenakan bahwa kondisi dari Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya Pulau Siberut yang sebahagian wilayahnya masuk kedalam kawasan Taman Nasional Siberut. Sehingga hal tersebut juga mempengaruhi bagaimana pemberdayaan ini dilaksanakan seperti pembangunan rumah dan dan fasilitas lainnya bagi masyarakat KAT. Faktor eksternal juga sangat mempengaruhi dari keberhasilan dari program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai, seperti kebiasaan masyarakat Mentawai yang terikat dengan adat istiadatnya. Dan juga kondisi perekonomian mereka mempengaruhi dalam pelaksanaan program ini.

## 6.2 Saran

Berdasarkan temuan dan analisi data yang peneliti jabarkan pada BAB V, peneliti menyarankan beberapa hal kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta kepada implementor program Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan peninjauan ulang terhadap Kelompok Kerja (POKJA) Provinsi Sumatera Barat yang sudah tidak aktif lagi dengan perincian tugas dari masing-masing instansi terkait sehingga tidak dibebankan pada Dinas Sosial Provinsi saja.

2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai juga perlu meninjau kembali Kelompok Kerja (POKJA) Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil dengan mengikut sertakan secara aktif seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masuk kedalam SK POKJA Kabupaten. Hal ini diharapkan agar lebih terciptanya komitmen dan komunikasi yang baik sehingga segala jenis kegiatan bisa tersinergi dengan baik
3. Pihak Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan koordinasi dengan pihak Balai Taman Nasional Siberut untuk dapat mendukung dan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan KAT di Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan sosialisasi yang lebih baik terhadap OPD-OPD terkait yang tergabung didalam POKJA Kabupaten untuk memaksimalkan peran serta dari masing- masing implementor.
5. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai harus mampu mengalokasikan anggaran yang lebih terhadap Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk melakukan pemberdayaan, pendampingan secara berkala kepada masyarakat penerima program KAT.